

Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dhamasraya

Rayhan Naufal Atthallah 1, Alpon Satrianto 2

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: rayhannaufal191@gmail.com, alponsatrianto@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

1 Juni 2026

Disetujui:

29 Juni 2026

Terbit daring:

15 Juli 2026

DOI: -

Sitasi:

Naufal,R. & Satrianto, A. (2026). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dhamasraya.

Abstract:

This study aims to examine the impact of regional expansion on the economic structure of Sijunjung Regency and Dharmasraya Regency. Specifically, it analyzes whether there have been changes in the economic structure before and after the regional expansion of the two regencies. The study employs secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatra Province, the Central Statistics Agency of Sijunjung Regency, and the Central Statistics Agency of Dharmasraya Regency. The analytical methods applied in this study are Location Quotient (LQ), Shift-Share Analysis, and Overlay Analysis. The data cover the period of 2000–2003 to represent the pre-expansion condition and 2014–2023 to represent the post-expansion condition. The findings indicate that: (1) there were changes in the leading economic sectors before and after the regional expansion in both Sijunjung Regency and Dharmasraya Regency; (2) there was a shift in the economic structure between the pre-expansion and post-expansion periods in both regencies; and (3) there were changes in the contribution of economic sectors to regional economic competitiveness following the regional expansion in both Sijunjung Regency and Dharmasraya Regency.

Keywords: Expansion, Location Quotient (LQ), Overlay, Shift Share, Economic Structure

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat perubahan struktur ekonomi sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dhamasraya. Metode analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Overlay. Data yang digunakan adalah data tahun 2000 - 2003 sebagai data sebelum pemekaran dan 2014 - 2023 sebagai data setelah pemekaran. Hasil penelitian (1) Terdapat perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung, di Kabupaten Dhamasraya terdapat perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah pemekaran. (2) Terdapat pergeseran struktur ekonomi antara sebelum pemekaran dan setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya. (3) Terdapat perubahan kontribusi sektor ekonomi terhadap daya saing ekonomi sebelum dan setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya.

Kata Kunci: Location Quotient (LQ), Overlay, Pemekaran, Shift Share, Struktur Ekonomi

Kode Klasifikasi JEL: R11, R12, R58

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi secara umum mencakup empat aspek utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) pengurangan kemiskinan; (3) perubahan atau transformasi sektor ekonomi; (4) proses pergeseran dari masyarakat berbasis pertanian menuju masyarakat berbasis industri yang berkelanjutan (Alfarabi et al., 2014). Transformasi struktural adalah prasyarat untuk meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan dan mendukung keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Di Indonesia, pembangunan telah

berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan., yang juga ditandai dengan perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan ini tercermin dari: (1) penurunan kontribusi sektor primer (pertanian), (2) peningkatan kontribusi sektor sekunder (industri), dan (3) sektor tersier (jasa) yang relatif stabil, meskipun kontribusinya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemekaran daerah merupakan strategi yang diterapkan ketika wilayah pelayanan telah meluas. Hal ini sering kali membuat pemerintah kesulitan mencapai kinerja terbaik dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Kebijakan pemekaran daerah mengharapkan agar daerah asal mampu mengelola otonomi secara optimal, sehingga bisa menjadi dorongan bagi daerah yang baru dibentuk untuk juga mandiri dalam menjalankan otonominya. Hal ini menjadi faktor krusial dalam menilai keberhasilan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk menghadirkan semangat baru dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang lebih besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemekaran juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik pasca pemekaran. Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya membentuk kabupaten atau kota baru yang diharapkan dapat berperan sebagai pendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Pertumbuhan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan, dengan proses birokrasi yang lebih sederhana dan pengawasan yang lebih mudah dilakukan.

Sebelum mengajukan usulan pemekaran wilayah, perlu dilakukan kajian yang mendukung proses tersebut. Kajian ini disusun oleh kepala daerah yang bersangkutan dan bertujuan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru. Evaluasi ini mencakup analisis teknis secara kuantitatif, meliputi jumlah penduduk, potensi wilayah, serta kemampuan ekonomi dan keuangan selama sepuluh tahun terakhir, termasuk kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah asal. Selain data kuantitatif, kajian juga mempertimbangkan aspek kualitatif, seperti potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, potensi terjadinya konflik, serta kondisi etnis dan sejarah wilayah tersebut. Sebelum dan sesudah pemekaran, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya memiliki berbagai sektor ekonomi yang berperan dalam menyumbang PDRB masing-masing daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten dhamasraya

Sektor	Sebelum Pemekaran	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Dharmasraya
1. Pertanian	27,88	26,76	25,98
2. Pertambangan dan penggalan	17,05	13,11	6,48
3. Industri Pengolahan	4,79	2,74	5,15
4. Listrik dan Air	0,81	0,04	0,15
5. Bangunan	9,27	14,91	14,96
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,98	12,36	15,38
7. Angkutan & Komunikasi	6,23	5,48	6,65
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3,70	2,4	2,24
9. jasa-jasa	18,30	2,94	2,64

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebelum terjadinya pemekaran sektor ekonomi antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya masih dalam Kabupaten sijunjung Sawah lunto. Setelah adanya pemekaran dari 9 sektor terdapat beberapa sektor yang mendominasi Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya. Seperti pertambangan dan penggalian sebelum pemekaran kontribusi terhadap pdrb sebesar 17,05%. Setelah adanya pemekaran kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sijunjung sebesar 13,11%, dimana kontribusi ini lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor pertambahan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya yang hanya 6,48%. Hal ini terjadi karena sektor pertambangan dan penggalian yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Sijunjung Sawahlunto, setelah pemekaran justru menjadi bagian dari Kabupaten Sijunjung. Akibatnya, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan hasil pemekaran hanya memperoleh sebagian kecil dari sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat dari rata-rata kontribusi sektor-sektor ekonomi, Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung.

Tabel 2. Persentase rata-rata kontribusi terhadap jumlah PDRB Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Persentase Kontribusi Terhadap PDRB	
	Sijunjung	Dharmasraya
2019	3,71	4,2
2020	3,77	4,23
2021	3,77	4,24
2022	3,74	4,29
2023	3,74	4,27
Rata-Rata	3,74	4,24

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Sijunjung sebagai daerah induk lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya sebagai hasil pemekaran. Jika dibandingkan, kontribusi Dharmasraya mencapai 4,24%, sedangkan Sijunjung hanya sebesar 3,74%. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, termasuk pengelolaan struktur ekonomi, tingkat pertumbuhan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menengah, dan lanjutan. (Tenggara, 2015).

Analisis shift-share merupakan salah satu metode dalam studi ekonomi yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan suatu wilayah. Pendekatan ini menggambarkan perkembangan daerah dengan melihat struktur ekonominya, perubahan sektor-sektor unggulan dalam dua periode waktu, serta menilai kontribusi sektor ekonomi daerah dalam konteks yang lebih luas. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Perloff dan rekan-rekannya pada tahun 1960. (Lutfi Muta'ali, 2015).

Pembangunan ekonomi daerah didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan dalam struktur ekonomi, yang mencakup peningkatan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat (Siburian & Ompusunggu, 2023), yang biasanya ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan negara. Pada level daerah, struktur ekonomi dapat dimaknai sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang diukur melalui indikator produk domestik bruto (PDB). Struktur ini merujuk pada susunan sektor-sektor yang membentuk perekonomian suatu negara (Malau et al., 2024)..

Awalnya, perekonomian terbagi ke dalam tiga sektor utama: pertanian, industri, dan jasa. Namun, seiring berkembangnya globalisasi dan kemajuan teknologi, ketiga sektor tersebut mengalami perubahan yang semakin dinamis. Kondisi struktur ekonomi yang sehat menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pergeseran struktur ekonomi menunjukkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, di mana perhatian yang semula terfokus pada sektor pertanian kini mulai beralih ke sektor industri dan jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Ivakdalam (2011) menunjukkan bahwa Sebelum terjadinya pemekaran wilayah, sektor unggulan di Kabupaten Merauke adalah sektor pertanian serta sektor kelistrikan, gas, dan penyediaan air bersih. Setelah pemekaran, fokus sektor unggulan berubah menjadi sektor pertanian dan sektor transportasi serta komunikasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Merauke selama periode 2001–2003 mencapai 7,28 persen, kemudian meningkat menjadi 8,58 persen pada periode 2004–2006, yaitu pasca pemekaran. Namun, pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena adanya pemindahan pelabuhan ekspor perikanan ke daerah lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Iskandar dan Bernardin Ridwan (2012) menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif terhadap struktur dan perkembangan ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan nilai PDRB setelah pemekaran terlihat jelas, dengan rata-rata mencapai 5,44%, yang menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan rata-rata sebelum pemekaran yang hanya sebesar 1,54%. Selain itu, rata-rata PDRB per kapita juga mengalami kenaikan, dari Rp987,4 ribu menjadi Rp3,507 juta. Pemekaran turut berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah, yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan daerah tahunan sebesar 1,05%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 0,67% sebelum pemekaran.

Melihat fenomena yang terjadi dan didukung oleh uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti perubahan sektor unggulan sebelum dan sesudah pemekaran. Penelitian ini juga akan mengkaji pergeseran struktur perekonomian serta kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya sebelum dan setelah pemekaran. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyoroti struktur ekonomi pasca-pemekaran tanpa memperhatikan kondisi sebelumnya, studi ini akan membahas kedua periode tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perbandingan struktur ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian ini. “Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dhamasraya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melihat dampak dari pemekaran terhadap struktur ekonomi daerah pemekaran. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten sijunjung, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan di Kaupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sijunjung Sawah Lunto Sijunjung, menggunakan data sebelum pemekaran 2001–2003 dan setelah pemekaran menggunakan data tahun 2010-2023. Penelitian ini berfokus pada perubahan sektor struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah terjadinya pemekaran. Selain itu penelitian juga menganalisis perubahan kontribusi sektor unggulan di daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan 3 metode analisis, yaitu :

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ mengungkapkan potensi suatu wilayah berdasarkan kondisi kekayaan yang ada di sana. LQ digunakan untuk mengetahui spesialisasi kegiatan produksi di suatu daerah. Secara umum, metode ini memberikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor-sektor di daerah yang dianalisis dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas (Tarigan, R.2007). Rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{p_{ij}/p_j}{p_i/p} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

p_{ij} : PDRB sektori di Kabupaten j

p_j : PDRB sektor i di provinsi/acuan Kabupaten j

p_i : PDRB total di Kabupaten j

p : PDRB total di Provinsi/ acuan Kabupaten j

Berdasarkan persamaan diatas, terdapat dua kemungkinan yang didapat, yaitu :

- Jika $LQ \geq 1$, berarti peranan sektor i di Kabupaten Sijunjung atau Kabupaten Dhamasraya lebih besar dibandingkan peran sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini bisa disebut sebagai sektor unggulan atau sektor basis.
- Jika $LQ < 1$, berarti peranan sektor i di Kabupaten Sijunjung atau Kabupaten Dhamasraya lebih kecil dibandingkan peranan sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini bisa disebut sebagai sektor non unggulan atau sektor non basis.

Analisis Shift Share

Analisis Shift-Share kerap digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam struktur ekonomi suatu wilayah. Metode ini bekerja dengan membandingkan dinamika struktur ekonomi di tingkat kabupaten dengan kondisi ekonomi di tingkat provinsi. Melalui perbandingan ini, perubahan atau pergeseran struktur ekonomi suatu daerah dapat diamati dengan lebih jelas. Hasil dari analisis Shift-Share memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi yang saling berkaitan antar sektor, serta menyajikan informasi tentang keterkaitan antar aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Metode shift-share didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi atau peningkatan nilai tambah di suatu daerah (Δe_i) dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu *Nasional Share* (NS_i), pertumbuhan sektoral atau *Proportional shift* (PS_i) dan pertumbuhan daya sing wilayah *Differential Shift* (DS_i) (Kasikoen, 2018). Langkah awal dalam perhitungan shift share adalah menentukan perubahan nilai PDRB pada sektor i di wilayah j dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta e_i = NS_i + PS_i + DS_i \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Δe_i : Perubahan nilai tambah sektor i

NS_i : Nasional Share

PS_i : Proposional Share

DS_i : Differential Share

Berdasarkan persamaan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut :

$$NS_i = P_{is} (P_r) \dots\dots\dots (3)$$

$$PS_i = P_{is} (P_{ir} + P_r) \dots\dots\dots (4)$$

$$DS_i = P_{is} (P_{is} + P_{ir}) \dots\dots\dots (5)$$

$$P_{is} = \frac{Y'_{is} - Y_{is}}{Y_{is}} \dots\dots\dots (6)$$

$$P_r = \frac{Y' - Y}{Y} \dots\dots\dots (7)$$

$$P_{ir} = \frac{Y'_{ir} - Y_{ir}}{Y_{ir}} \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan :

P_{is} : Pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten wilayah studi

P_{ir} : Pertumbuhan PDRB sektor i di provinsi wilayah acuan

P_r : Pertumbuhan PDRB di provinsi wilayah acuan

Y'_{is} : PDRB sektor i pada wilayah studi (Sijunjung dan Dhamasraya) tahun akhir

Y_{is} : PDRB sektor i pada wilayah studi (Sijunjung dan Dhamasraya) tahun dasar

Y' : PDRB total wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat) pada tahun akhir

Y : PDRB total wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat) pada tahun dasar

Y'_{ir} : PDRB setkor i wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat) pada tahun akhir

Y_{ir} : PDRB setkor i wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat) pada tahun akhir

Berdasarkan persamaan diatas, akan terdapat dua kemungkinan, yaitu :

1. Jika nilai $\Delta e_i > 0$ (positif), menunjukan bahwa pertumbuhan sektor i di kabupaten Sijunjung atau Dhamasraya sebelum/setelah terjadi pemekaran termasuk dalam kelompok progresif.
2. Jika nilai $\Delta e_i < 0$ (negative), menunjukan bahwa pertumbuhan sektor i di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya sebelum/setelah terjadi pemekaran termasuk kedalam kelompok lambat.

Analisis Overlay

Analisis overlay berperan dalam memberikan kesimpulan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya (Hendra Perdana, 2019) . Hasil dari analisis overlay ini didasarkan pada kesamaan koefisien antara analisis LQ dan shift share (Huda & Cahyono, 2021). Dengan demikian, hasil akhir mengenai sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhimassraya, baik sebelum maupun setelah pemekaran, dapat dilihat melalui penggabungan dari ketiga analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Location Quotient (LQ)

- a. Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), terjadi perubahan sektor Basis yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil analisis Location Quotient (LQ) Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)				Setelah Pemekaran Kab.Sijunjung (2010-2023)			
No.	Lapangan Usaha	Rata - rata LQ	Kategori	No.	Lapangan Usaha	Rata- Rata LQ	Kategori
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,3	BASIS	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	BASIS
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,2	BASIS	2.	Pertambangan dan Penggalian	3,35	BASIS
3.	Industri Pengolahan	0,3	NON BASIS	3.	Industri Pengolahan	0,33	NON BASIS
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,3	NON BASIS	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,44	NON BASIS
5.	Konstruksi	2,4	BASIS	5.	Konstruksi	1,35	BASIS
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,7	NON BASIS	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,72	NON BASIS
7.	Informasi dan Komunikasi	0,5	NON BASIS	7.	Informasi dan Komunikasi	0,62	NON BASIS
8.	Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,8	NON BASIS	8.	Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,66	NON BASIS
9.	Jasa-jasa	1,1	BASIS	9.	Jasa-jasa	0,95	NON BASIS

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) sebelum pemekaran terdapat sektor basis yaitu pertanian kehutan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, kontruksi dan jasa-jasa. Setelah adanya pemekaran Kabupaten Sijunjung menunjukan adanya pengurangan sektor basis, yaitu pada sektor jasa-jasa. Pada sebelumm pemekaran sektor jasa-jasa termasuk pada sektor basis, namun setelah pemekaran sektor jasa-jasa berubah menjadi sektor non basis. Sehingga jumlah sektor basis setelah pemekaran mengalami perubahan dari 4 sektor menjadi 3 sektor basis.

- b. Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Dhamasraya Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), terjadi perubahan sektor Basis yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Dhamasraya Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)				Setelah Pemekaran Kab.Dhamasraya (2010-2023)			
No.	Lapangan Usaha	Rata - rata LQ	Kategori	No.	Lapangan Usaha	Rata- Rata LQ	Kategori
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,3	BASIS	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,30	BASIS
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,2	BASIS	2.	Pertambangan dan Penggalian	2,18	BASIS
3.	Industri Pengolahan	0,3	NON BASIS	3.	Industri Pengolahan	0,61	NON BASIS
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,3	NON BASIS	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,18	NON BASIS
5.	Konstruksi	2,4	BASIS	5.	Konstruksi	1,38	BASIS
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,7	NON BASIS	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,72	NON BASIS
7.	Informasi dan Komunikasi	0,5	NON BASIS	7.	Informasi dan Komunikasi	0,91	NON BASIS
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,8	NON BASIS	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,81	NON BASIS
9.	Jasa-jasa	1,1	BASIS	9.	Jasa-jasa	0,89	NON BASIS

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) sebelum pemekaran terdapat sektor basis yaitu pertanian kehutan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, kontruksi dan jasa-jasa. Setelah adanya pemekaran Kabupaten Dhamasraya menunjukan adanya pengurangan sektor basis, yaitu pada sektor jasa-jasa. Pada sebelumm pemekaran sektor jasa-jasa termasuk pada sektor basis, namun setelah pemekaran sektor jasa-jasa berubah menjadi sektor non basis. Sehingga jumlah sektor basis setelah pemekaran mengalami perubahan dari 4 sektor menjadi 3 sektor basis.

2. Analisis Shift Share

- Hasil Proposional Share Kabapaten Sijunjung sebelum Pemekaran (2001-2003) dan setelah pemekaran (2010-2023), terjadi Pergeseran Struktur Ekonomi yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Proposional ShareKabupaten Sijunjung sebelum dan setelah pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Sijunjung (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20352,4	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-377259,68
2.	Pertambangan dan penggalian	-10145,0	2.	Pertambangan dan penggalian	-328305,45

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Sijunjung (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)
3.	Industri Pengolahan	-1749,7	3.	Industri Pengolahan	-55781,06
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	563,2	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-174,33
5.	Konstruksi	656,3	5.	Konstruksi	143643,32
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,1	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	118702,30
7.	Informasi dan Komunikasi	-1723,2	7.	Informasi dan Komunikasi	152088,81
8.	Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-503,0	8.	Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6153,23
9.	Jasa-jasa	-4854,0	9.	Jasa-jasa	59369,30

Berdasarkan hasil diatas, menunjukan terdapat pergeseran sektor yang mengalami perubahan yang progresif dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebelum adanya pemekaran sektor-sektor yang termasuk dalam sektor progresif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Kontruksi, dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sementara setelah adanya pemekaran sektor progresif bergerak pada sektor kontruksi, perdagangan, Hotel, dan Restoran, Informasi dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-Jasa. Dimana Sektor yang mengalami Pergeseran Progresif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4 ,namun Setelah Pemekaran Berjumlah 5 Sektor, ini Menandakan bergeser ke Arah Positif.

2. Hasil Proporsional Share Kabupaten Dhamasraya sebelum Pemekaran (2001-2003) dan setelah pemekaran (2010-2023), terjadi Pergeseran Struktur Ekonomi yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Proporsional Share Dhamasraya Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Dhamasraya (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20352,4	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-442025,38
2.	Pertambangan dan Penggalian	-10145,0	2.	Pertambangan dan Penggalian	-338864,82
3.	Industri Pengolahan	-1749,7	3.	Industri Pengolahan	-133759,02
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	563,2	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-78,65
5.	Konstruksi	656,3	5.	Konstruksi	182852,45
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,1	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	139449,28

Sebelum Pemekaran Kab Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Dhamasraya (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Psi (Juta Rupiah)
7.	Informasi dan Komunikasi	-1723,2	7.	Informasi dan Komunikasi	324961,78
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-503,0	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8478,07
9.	Jasa-jasa	-4854,0	9.	Jasa-jasa	72121,06

Berdasarkan hasil diatas, menunjukan hasil yang sama dengan Kabupaten Sijunjung yaitu terdapat pergeseran sektor yang mengalami perumbuhan yang progresif dibandingkan dengat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebelum adanya pemekaran sektor-sektor yang termasuk dalam sektor progresif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Kontruksi, dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sementara setelah adanya pemekaran sektor progesif bergerak pada sektor kontruksi, perdagangan, Hotel, dan Restoran, Informasi dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-Jasa. Dimana Sektor yang mengalami Pergeseran Progegresif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4 ,namun Setelah Pemekaran Berjumlah 5 Sektor, ini Menandakan bergeser ke Arah Positif.

- Hasil Diferensial Share Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), terjadi Pergeseran Struktur Ekonomi yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Diferensil Share Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Sijunjung (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Dsi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Dsi (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-9187,2	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-44679,65
2.	Pertambangan dan Penggalian	-449,3	2.	Pertambangan dan Penggalian	192822,18
3.	Industri Pengolahan	1688,9	3.	Industri Pengolahan	19364,74
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-482,1	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	355,35
5.	Konstruksi	4305,7	5.	Konstruksi	67991,79
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-711,7	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18734,47
7.	Informasi dan Komunikasi	4436,6	7.	Informasi dan Komunikasi	-11536,15
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-263,1	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-26335,38
9.	Jasa-jasa	2694,6	9.	Jasa-jasa	87635,40

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pemekaran terdapat beberapa sektor yang memiliki daya saing di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif sebelum ada nya pemekaran hanya terdiri dari 4 sektor yaitu Industri Pengolahan, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa-Jasa. Sementara setelah adanya pemekaran terdapat pergeseran dimana sektor yang memiliki keunggulan kompetitif menjadi 6 sektor, yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Kontruksi, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Jasa-Jasa. Dimana Sektor yang Memiliki Keunggulan Kompetitif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4 ,namun Setelah Pemekaran Berjumlah 6 Sektor, ini Menandakan Keunggulan Kompetitif bergeser ke Arah Positif.

4. Hasil Diferensial Share Kabupaten Dhamasraya Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), terjadi Pergeseran Struktur Ekonomi yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Diferensial Share Kabupaten Dhamasraya Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Dhamasraya (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Dsi (Juta Rupiah)	No.	Lapangan Usaha	Dsi (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-9187,2	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-842318,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	-449,3	2.	Pertambangan dan Penggalian	-164309,37
3.	Industri Pengolahan	1688,9	3.	Industri Pengolahan	-147802,06
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-482,1	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-1067,65
5.	Konstruksi	4305,7	5.	Konstruksi	-637659,66
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-711,7	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-901843,24
7.	Informasi dan Komunikasi	4436,6	7.	Informasi dan Komunikasi	-547754,17
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-263,1	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-181596,58
9.	Jasa-jasa	2694,6	9.	Jasa-jasa	-524583,86

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pemekaran terdapat beberapa sektor yang memiliki daya saing di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif sebelum ada nya pemekaran hanya terdiri dari 4 sektor yaitu Industri Pengolahan, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa-Jasa. Sementara setelah adanya pemekaran tidak ada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Dhamasraya. Dimana Sektor yang Memiliki Keunggulan Kompetitif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4 ,namun Setelah Pemekaran Berjumlah 0 Sektor,ini Menandakan Keunggulan Kompetitif bergeser ke Arah Negatif.

3. Analisis Overlay

1. Analisis Overlay Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), dimana terdapat Perbuhan Sektor Unggulan

Terhadap Daya Saing Perekonomian Sumatera Barat yang mana dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 9 Analisis Overlay Kabupaten Sijunjung Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Sijunjung (2010-2023)		
No	Lapangan Usaha	Kategori Sektor	No.	Lapangan Usaha	Kategori Sektor
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Potensial	1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Potensial
2.	Pertambangan dan Penggalan	Potensial	2.	Pertambangan dan Penggalan	Unggulan
3.	Industri Pengolahan	Berkembang	3.	Industri Pengolahan	Berkembang
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Terbelakang	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Berkembang
5.	Konstruksi	Unggulan	5.	Konstruksi	Unggulan
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Terbelakang	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Berkembang
7.	Informasi dan Komunikasi	Berkembang	7.	Informasi dan Komunikasi	Terbelakang
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Terbelakang	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Terbelakang
9.	Jasa-jasa	Unggulan	9.	Jasa-jasa	Berkembang

Berdasarkan hasil dari analisis overlay diatas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. Sebelum pemekaran terdapat 2 sektor potensial, 2 sektor unggulan, 2 sektor berkembang, dan 3 sektor terbelakang. Sementara setelah terjadinya pemekaran terdapat 1 sektor potensial, 2 sektor unggulan, 4 sektor berkembang, dan 2 sektor terbelakang, hal ini menandakan bahwa Perubahan Sektor unggulan terjadi namun,tidak dengan bertambahnya Sektor Unggulan.

2. Analisis Overlay Kabupaten Dhamasraya Sebelum Pemekaran (2001-2003) dan Setelah Pemekaran (2010-2023), dimana terdapat Perbuhan Sektor Unggulan Terhadap Daya Saing Perekonomian Sumatera Barat yang mana dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 10 Analisis Overlay kabupaten Dhamasraya Sebelum dan Setelah Pemekaran

Sebelum Pemekaran Kab.Sijunjung (2001-2003)			Setelah Pemekaran Kab.Dhamasraya (2010-2023)		
No.	Lapangan Usaha	Kategori Sektor	No.	Lapangan Usaha	Kategori Sektor
1.	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Potensial	1.	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Potensial
2.	Pertambangan dan Penggalian	Potensial	2.	Pertambangan dan Penggalian	Potensial
3.	Industri Pengolahan	Berkembang	3.	Industri Pengolahan	Terbelakang
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Terbelakang	4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Terbelakang
5.	Konstruksi	Unggulan	5.	Konstruksi	Potensial
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Terbelakang	6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Terbelakang
7.	Informasi dan Komunikasi	Berkembang	7.	Informasi dan Komunikasi	Terbelakang
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Terbelakang	8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Terbelakang
9.	Jasa-jasa	Unggulan	9.	Jasa-jasa	Terbelakang

Berdasarkan hasil dari analisis overlay diatas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. Sebelum pemekaran terdapat 2 sektor potensial, 2 sektor unggulan, 2 sektor berkembang, dan 3 sektor terbelakang. Sementara setelah terjadinya pemekaran terdapat 3 sektor potensial dan 6 sektor terbelakang, tidak ada sektor unggulan dan berkembang di Kabupaten Dhamasraya setelah terjadi pemekaran,hal ini Menandakan Bahwa terjadi Perubahan Sektor unggulan ,namun ke arah yang Negatif.

PEMBAHASAN

1. Perubahan sektor unggulan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya sebelum dan setelah pemekaran

Perubahan sektor basis setelah pemekaran dapat terjadi karena pemekaran wilayah mengubah struktur ekonomi, distribusi sumber daya, jumlah penduduk, dan pola aktivitas ekonomi di daerah yang dimekarkan. Dalam kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya, dimana terdapat Perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah pemekaran di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya

Berdasarkan hasil Location Quotient (LQ) di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya, terdapat perubahan sektor basis sebelum dan setelah pemekaran, Kedua Kabupaten ini memiliki sektor basis yang sama setelah adanya pemekaran. Sebelum pemekaran terdapat 4 sektor yang dikategorikan dalam sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan jasa-jasa. Sedangkan setelah pemekaran sektor jasa-jasa berubah menjadi sektor non basis, sehingga di Kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dhamasraya setelah adanya pemekaran hanya ada 3 sektor basis yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan sektor industri.

Ini berarti bahwa terjadi perubahan sektor ekonomi yang menjadi keunggulan utama (sektor basis) di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran wilayah, yang mana Perekonomian daerah menjadi lebih bertumpu pada sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Oleh karena itu Pemekaran wilayah dapat mengubah struktur ekonomi daerah karena adanya perubahan sumber daya, penduduk, investasi, dan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lipat Masa (2020) yang menyatakan bahwa hasil perhitungan LQ sektor yang termasuk dalam kategori basis di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum pemekaran sebanyak dua sektor dan setelah pemekaran sebanyak empat belas sektor. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kabupaten induk lebih dominan dalam kategori basis yang mana dapat memenuhi kebutuhan daerahnya bahkan mampu mengekspor ke daerah lain.

2. Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya sebelum dan setelah pemekaran

A. Berdasarkan hasil analisis shift share untuk Proporsional Shift di Kabupaten Sijunjung sebelum adanya pemekaran sektor-sektor yang termasuk dalam sektor progresif adalah sektor pertanian, listrik dan air, konstruksi, perdagangan hotel dan restoran. Sementara setelah adanya pemekaran sektor yang mengalami pertumbuhan yang progresif adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Sementara di Kabupaten Dharmasraya juga mengalami pergerakan sektor progresif yaitu pada sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur perekonomian Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya setelah pemekaran wilayah, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sektor yang tergolong progresif dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat Provinsi Sumatera Barat, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi sektor primer menuju sektor tersier (jasa).

Bertambahnya jumlah sektor progresif dari 4 menjadi 5 sektor mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Pemekaran mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur, perluasan aktivitas perdagangan, pertumbuhan layanan komunikasi, perkembangan sektor keuangan, serta meningkatnya kebutuhan akan berbagai jasa. Akibatnya, struktur ekonomi menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian.

Dengan demikian, hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setelah pemekaran terjadi transformasi ekonomi ke arah yang lebih maju dan dinamis, yang tercermin dari meningkatnya jumlah sektor progresif serta berkembangnya sektor-sektor jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran ekonomi ke arah yang positif dan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Berdasarkan hasil analisis shift share untuk Diferensial Shift di Kabupaten Sijunjung dan sebelum dan setelah adanya pemekaran menunjukkan terdapat pergeseran sektor yang mengalami perubahan yang progresif dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebelum adanya pemekaran sektor-sektor yang termasuk dalam sektor progresif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Kontruksi, dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sementara setelah adanya pemekaran sektor progresif bergerak pada sektor konstruksi, perdagangan, Hotel, dan Restoran, Informasi dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-Jasa. Dimana Sektor yang mengalami Pergeseran Progresif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4, namun Setelah Pemekaran Berjumlah 5 Sektor, ini Menandakan bergeser ke Arah Positif. Sementara di Kabupaten Dharmasraya sebelum dan setelah Terjadinya Pemekaran menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pemekaran terdapat beberapa sektor yang memiliki daya saing di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif sebelum ada nya pemekaran hanya terdiri dari 4 sektor yaitu Industri Pengolahan, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa-Jasa. Sementara setelah adanya pemekaran tidak ada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Dharmasraya. Dimana Sektor yang Memiliki Keunggulan Kompetitif di Sebelum Pemekaran Berjumlah 4, namun Setelah Pemekaran Berjumlah 0 Sektor, ini Menandakan Keunggulan Kompetitif bergeser ke Arah Negatif.

Perbedaan hasil antara kedua kabupaten menunjukkan bahwa dampak pemekaran wilayah dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang pembangunan yang muncul setelah pemekaran. Kabupaten Sijunjung berhasil memanfaatkan pemekaran untuk mendorong perkembangan sektor konstruksi, perdagangan, komunikasi, keuangan, dan jasa sehingga jumlah sektor progresif meningkat. Sebaliknya, Kabupaten Dharmasraya belum mampu mempertahankan keunggulan kompetitif sektor-sektor ekonominya karena pertumbuhan sektor tersebut lebih lambat dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemekaran memberikan dampak yang lebih positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi di Kabupaten Sijunjung dibandingkan di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunoto (2020) yang menyatakan bahwa Ada kecenderungan terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten induk sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah. Sebelum terjadi pemekaran wilayah struktur perekonomian kabupaten induk cenderung didominasi oleh sektor primer. Setelah dilakukan pemekaran ada pergeseran peran sektor ekonomi dari sektor primer bergeser ke sektor sekunder dan sektor tersier, dengan sektor unggulan menjadi lebih banyak lagi.

3. Perubahan sektor unggulan terhadap daya saing ekonomi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya sebelum dan setelah pemekaran

Berdasarkan hasil analisis overlay Kabupaten Sijunjung bahwa terdapat perubahan sektor unggulan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. Sebelum terjadinya pemekaran sektor unggulan berdasarkan hasil overlay terdapat pada sektor konstruksi dan jasa-jasa. Sementara itu, setelah adanya pemekaran sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung bergerak menjadi sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalan. Hasil yang sama di Kabupaten Dharmasraya setelah adanya pemekaran di Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki sektor unggulan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah telah menyebabkan perubahan struktur ekonomi daerah. Kabupaten Sijunjung mampu mempertahankan dan mengembangkan sektor-sektor tertentu sehingga tetap memiliki sektor unggulan, sedangkan Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi

tantangan dalam menciptakan sektor yang memiliki keunggulan sekaligus pertumbuhan yang tinggi dibandingkan wilayah acuan.

Perubahan sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung terjadi karena pemekaran mengubah struktur ekonomi daerah dan mendorong berkembangnya sektor konstruksi serta pemanfaatan potensi pertambangan yang lebih optimal. Sementara itu, Kabupaten Dharmasraya belum memiliki sektor unggulan karena sebagai daerah otonom baru masih berada dalam tahap penyesuaian dan pembangunan, sehingga belum terdapat sektor yang memiliki keunggulan komparatif (kontribusi besar) dan keunggulan kompetitif (pertumbuhan tinggi) secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perkembangan ekonomi masing-masing daerah.

Hasil ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, (2020) dengan hasil analisis overlay dengan hasil di kabupaten induk terdapat 10 sektor unggulan, 4 sektor berkembang, 2 sektor potensial dan satu sektor terbelakang. Sedangkan pada kabupaten hasil pemekaran tidak ada satupun sektor unggulan, 15 sektor berkembang, 1 sektor potensial dan dua sektor terbelakang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olahaa data dan pembahsan maka terdapat beberapa kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis LQ menunjukkan terdapat perubahan sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya sebelum dan setelah pemekaran, dimana sebelum pemekaran terdapat 4 sektor yang dikategorikan dalam sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, kontruksi, dan jasa-jasa. Sedangkan setelah pemekaran sektor jasa-jasa berubah menjadi sektor non basis, sehingga di Kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dhamasraya setelah adanya pemekaran hanya ada 3 sektor basis yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan sektor industri.
2. Hasil dari analisis shift share menunjukkan terdapat pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya sebelum dan setelah terjadinya pemekaran, dimana Bertambahnya jumlah sektor progresif dari 4 menjadi 5 sektor mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah
3. Hasil analisis overlay menunjukkan terdapat perubahan sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dhamasraya sebelum dan setelah terjadinya pemekaran, dimana Sebelum terjadinya pemekaran sektor unggulan berdasarkan hasil overlay terdapat pada sektor kontruksi dan jasa-jasa. Sementara itu, setelah adanya pemekaran sektor unggulan di Kabupaten Sijunjung bergerak menjadi sektor kontruksi dan pertambangan dan penggalian. Hasil yang sama di Kabupaten Dhamasraya setelah adanya pemekaran di Kabupaten Dhamasraya tidak memiliki sektor unggulan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarabi, M. A., Hidayat, M. S., & Rahmadi, S. (2014). Perubahan struktur ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 171–180. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i3.1551>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Dogan, E., & Zhang, X. (2023). Pemodelan ekonomi model data panel nonparametrik untuk menguji kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. 128, 1–12.
- Elisabeth Ivakdalam. (2011). *Dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke*.
- Hamri, E., Putri, E. I. K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan pemekaran wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 111–126. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>
- Hendra Perdana, D. A. N. S. (2019). Analisis overlay untuk menentukan potensi sektor ekonomi unggulan dalam pembangunan daerah (Studi kasus dengan PDRB Kota Pontianak). *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 8(4). <https://doi.org/10.26418/bbimst.v8i4.36746>
- Huda, M. F., & Cahyono, H. (2021). Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Jombang. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 76–91. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p76-91>
- Tarigan, R. (2007). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasikoen, K. M. (2018). Analisis shift share untuk perencanaan wilayah (Studi kasus Kabupaten Bogor). *Agri Sosioekonomi*, 15(3), 442–448. <https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-shift-share-untuk-perencanaan-wilayah-studi-kasus--kabupaten-bogor-17617.html>
- Lipat Masa, E. (2020). Dampak pemekaran daerah terhadap struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.
- Malau, M., Damanik, D., & Panjaitan, P. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnmi*, 6(1), 114–123. <https://doi.org/10.36985/gpceay38>
- Mochammad Iskandar, & Bernardin Ridwan. (2012). *Analisis dampak pemekaran daerah terhadap perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk*.
- Siburian, A., & Ompusunggu, D. P. (2023). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.604>
- Tenggara, A. (2015). Analisis struktur ekonomi dan identifikasi sektor-sektor unggulan di Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(7), 163–174. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6387/5079>